



Optimalisasi Tata Kelola Melalui Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi di Jember

Atika Tri Utami¹

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4214>

*Correspondence: Atika Tri Utami

Email: atikatriutami@gmail.com

Received: 07-03-2025

Accepted: 16-04-2025

Published: 28-05-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

diberikan kepada pemangku kebijakan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital dan meningkatkan pelatihan sumber daya manusia guna mendukung implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Katakunci: Tata Kelola, Digitalisasi, Pemerintahan, Transparansi, Inovasi

Abstract: Good governance is a crucial element in supporting efficiency, transparency, and accountability in regional government administration, including in Jember Regency. Digitalization has emerged as a primary solution in addressing the challenges of globalization and the Fourth Industrial Revolution, particularly in improving the quality of public services. This article aims to analyze the role of digitalization in the governance of Jember, with a focus on the implementation of information and communication technology across various service sectors. This research employs a descriptive qualitative method by examining secondary data from official documents and academic literature. The results indicate that digitalization supports administrative efficiency, enhances public participation, and strengthens oversight of local government policies. However, challenges such as digital infrastructure disparities and limited human resource capacity remain significant obstacles. Therefore, digitalization is a key element in realizing adaptive and sustainable governance in Jember. The article recommends that policymakers accelerate the development of digital infrastructure and improve human resource training to support the implementation of digital-based governance.

Keywords: Governance, Digitalization, Government, Transparency, Innovation

Pendahuluan

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi menjadi penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Kolaborasi yang dimaksud melibatkan integrasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan teknologi untuk menciptakan layanan publik yang efisien, transparan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses administrasi dapat disederhanakan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, dan pengawasan terhadap kebijakan menjadi lebih efektif.

Namun, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi di era digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kesenjangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami teknologi digital juga menghambat implementasi yang optimal. Tantangan lain adalah adanya resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak internal pemerintah maupun masyarakat.

Di sisi lain, kebutuhan penelitian terkait tata kelola pemerintahan berbasis digital semakin mendesak. Metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang relevan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menganalisis pengalaman, persepsi, dan dinamika di antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini juga dapat menggali lebih jauh tentang faktor-faktor keberhasilan, hambatan, serta dampak yang dihasilkan dari digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, penting untuk menyusun kerangka tata kelola pemerintahan yang berbasis kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi utama. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami tantangan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadapi dinamika perubahan zaman.

Selain itu, pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi di era digital juga terkait dengan kebutuhan akan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Digitalisasi memberikan peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, terutama di daerah terpencil. Namun, tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat, upaya ini dapat menghasilkan kesenjangan baru dalam akses dan pemanfaatan teknologi. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kolaborasi dapat dioptimalkan, termasuk dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini juga membuka

ruang untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan kolaboratif dalam menghadapi dinamika era digital, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua lapisan.

Tinjauan Pustaka

Teori Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kolaborasi Tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini berakar pada konsep governance yang melihat pemerintah bukan sebagai satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan publik. Ansell dan Gash (2008) memperkenalkan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan kolektif di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip dasar tata kelola kolaboratif mencakup keterbukaan, kepercayaan antar aktor, dan pengambilan keputusan yang inklusif. Pendekatan ini relevan di era digital karena teknologi memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan efisien dalam proses pemerintahan.

Prinsip *Good Governance* Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Empat prinsip utama good governance meliputi:

1. Akuntabilitas: Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Teknologi digital memungkinkan pelacakan dan evaluasi kebijakan secara lebih transparan.
2. Transparansi: Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi mendukung penyediaan data secara real-time melalui platform daring.
3. Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi elemen penting. Teknologi seperti e-government mempermudah partisipasi warga negara melalui aplikasi, survei online, dan forum diskusi.
4. Efisiensi: Tata kelola pemerintahan harus memastikan alokasi sumber daya secara optimal. Digitalisasi proses administrasi mengurangi birokrasi yang panjang dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Relevansi Metode Kualitatif Metode kualitatif sangat relevan dalam penelitian terkait tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi dan digitalisasi. Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi, metode ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi digital. Selain

itu, metode kualitatif membantu mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan digitalisasi, tingkat partisipasi, dan efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan pihak lain. Melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi, penelitian kualitatif memberikan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif. Hal ini menjadikannya penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang responsif dan berbasis bukti.

Dengan menggabungkan teori tata kelola kolaboratif, prinsip good governance, dan metode kualitatif, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan di era digital. Prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memastikan keberlanjutan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam implementasi tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi dan digitalisasi. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena yang kompleks, khususnya dalam konteks interaksi antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat. Fokus utama penelitian adalah pada analisis data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen kebijakan, laporan resmi, serta artikel jurnal yang relevan. Pendekatan ini dilakukan tanpa melibatkan wawancara, karena tujuan utama adalah menganalisis data yang sudah tersedia untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, termasuk dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional seperti World Bank dan OECD, artikel jurnal ilmiah, serta studi kasus implementasi digitalisasi di sektor publik. Data ini dipilih untuk memberikan kerangka empiris tentang bagaimana tata kelola berbasis kolaborasi diterapkan dalam berbagai konteks. Selain itu, analisis terhadap literatur juga membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

b. Prosedur Analisis

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema utama, pola, dan hubungan yang relevan dalam data. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pengumpulan Data: Mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Reduksi Data: Menyaring informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu tata kelola kolaboratif dan digitalisasi pemerintahan.

3. Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam kategori seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi, sesuai dengan prinsip good governance.
4. Interpretasi Data: Menganalisis temuan dengan menghubungkannya pada teori tata kelola kolaboratif dan prinsip good governance untuk memahami implikasi digitalisasi.

Alasan Tidak Menggunakan Wawancara

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara karena beberapa alasan. Pertama, fokus utama adalah pada analisis data sekunder yang sudah tersedia secara luas. Data ini mencakup informasi empiris dan teoritis yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kedua, penggunaan wawancara memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya tambahan yang tidak selalu efisien dalam konteks penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian adalah memberikan pandangan yang bersifat makro dan konseptual, sehingga pendekatan dokumentasi lebih relevan daripada wawancara yang biasanya memberikan wawasan bersifat mikro atau spesifik.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen, laporan, dan literatur, peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan validitas temuan. Selain itu, peneliti juga memeriksa konsistensi data dengan hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung interpretasi yang akurat.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi di era digital, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan tanpa memerlukan data primer melalui wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui digitalisasi di Jember. Berdasarkan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber data sekunder, temuan utama yang dapat disimpulkan adalah adanya perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai hasil dari digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jember. Hasil penelitian ini akan dibahas dalam konteks prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi, yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi.

1. Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kolaborasi **Akuntabilitas**

sebagai prinsip dasar good governance, merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jember telah meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi data yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu contoh yang terlihat jelas adalah implementasi sistem e-Government, yang memungkinkan proses administrasi dan pengambilan keputusan yang lebih terbuka. Program seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia memungkinkan warga Jember untuk mengakses, melaporkan, dan memantau progres pengaduan pelayanan publik secara langsung. Proses ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, transparansi anggaran dan proyek pemerintah di Jember juga telah semakin mudah diakses melalui platform digital. Portal-portal seperti Sistem Informasi Manajemen Anggaran (SIMAK) memungkinkan masyarakat untuk melihat alokasi dan penggunaan dana publik secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil, memberikan bukti yang dapat diverifikasi, dan mengurangi potensi praktik korupsi.

2. **Transparansi dan Kolaborasi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta** Transparansi adalah kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Digitalisasi, melalui penyebaran informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, telah membuka jalur komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di Jember. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan data, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, platform e-Procurement yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa publik memungkinkan sektor swasta di Jember untuk berpartisipasi dalam proses tender dengan lebih transparan. Proses tender yang terbuka, melalui platform digital ini, meminimalisir peluang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dan memungkinkan pihak swasta untuk mengetahui secara jelas kriteria dan keputusan yang diambil dalam pengadaan. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama lebih efektif, berlandaskan prinsip transparansi yang dibangun melalui digitalisasi. Selain itu, masyarakat Jember juga dapat berperan aktif dalam memberikan umpan balik atau informasi terkait kebijakan yang sedang berjalan melalui berbagai aplikasi online dan survei daring. Sebagai contoh, aplikasi Laporkan!, yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, memberikan wadah bagi masyarakat Jember untuk melaporkan masalah atau keluhan mengenai pelayanan publik secara langsung. Masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas layanan publik. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Partisipasi masyarakat

adalah prinsip tata kelola yang sangat penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah membuka lebih banyak saluran bagi masyarakat Jember untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem pemerintahan tradisional, partisipasi terbatas pada forum-forum fisik, yang memerlukan waktu dan biaya bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Namun, dengan adanya platform digital seperti e-Democracy, e-Consultation, dan e-Voting, masyarakat kini dapat berpartisipasi secara lebih inklusif dan efisien. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi juga memperkuat partisipasi masyarakat. Melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan warga Jember, menjawab pertanyaan, dan menerima kritik atau saran. Partisipasi ini, yang sebelumnya terbatas pada kelompok tertentu, kini dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan partisipasi yang lebih inklusif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Efisiensi dalam Proses Pemerintahan Digital Digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan yang ada, ditemukan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses administratif dan pengelolaan layanan publik telah mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas di Jember. Sebagai contoh, implementasi sistem Single Window dalam impor-ekspor memungkinkan proses yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengajukan berbagai izin dan dokumen dalam satu platform, yang secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin. Selain itu, penggunaan sistem otomatisasi dalam pelayanan publik seperti pajak, perizinan, dan administrasi kependudukan, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan penundaan. Hal ini berkontribusi pada penghematan biaya operasional dan peningkatan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan teknologi cloud juga memungkinkan pemerintah untuk menyimpan dan mengelola data secara lebih efisien, mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik yang mahal, dan meningkatkan aksesibilitas data bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

3. Tantangan dalam Implementasi Tata Kelola Berbasis Kolaborasi Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari digitalisasi, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi di Jember. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih ada antara daerah perkotaan dan

pedesaan. Akses terhadap teknologi dan internet yang terbatas di beberapa daerah menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam sistem digital pemerintahan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dalam penggunaan teknologi digital juga menjadi kendala dalam penerapan sistem pemerintahan digital yang efektif. Banyak pegawai pemerintah yang belum terbiasa dengan teknologi baru, sehingga perlu ada pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi yang didorong oleh digitalisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan pemerintah menyediakan informasi secara real-time, memfasilitasi partisipasi publik melalui platform digital, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Jember, penerapan teknologi informasi telah meningkatkan kualitas layanan publik, meskipun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan keterbatasan kapasitas SDM. Untuk mengoptimalkan implementasi tata kelola digital dan kolaboratif, diperlukan langkah strategis seperti percepatan pembangunan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintahan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat, termasuk perlindungan data pribadi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan upaya ini, tata kelola pemerintahan di era digital dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Fadilla. *Layanan tata kelola sistem Pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan peraturan Walikota no. 8 tahun 2023 kota Malang berdasarkan perspektif Siyasa Idariyyah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Chawla, D., & Misra, S. (2018). *Digital governance in developing countries: A case study approach*. Springer.
- Dargue, J. (2017). *Collaboration in governance: A conceptual overview*. *Governance Review*, 6(1), 35-50.
- Dent, M., & Whitehead, C. (2019). *The digital divide and governance in the 21st century: Bridging the gap*. *Journal of Information Technology and Politics*, 16(2), 122-139.
- Gable, M. G. (2019). *Strategic management in e-governance*. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 177-195.
- Grindle, M. S. (2017). *Good governance: A critical analysis*. *Governance and Public Policy Journal*, 23(2), 147-163.

- Heeks, R. (2017). *The impact of e-Government on development: An overview*. Journal of International Development, 29(3), 429-445.
- Hoffmann, R., & Alexander, J. (2018). *Digitalization and governance: Examining the role of technology in public sector management*. Journal of Digital Government, 4(1), 28-41.
- Hughes, C. (2020). *Collaboration and partnership in governance: A new model for success*.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2018). *E-Government and public sector transformation: A global perspective*. Information Systems Journal, 25(3), 279-298.
- Klijin, E. H., & Teisman, G. R. (2020). *Governance and collaboration in the public sector: Theories and practice*. Public Administration Review, 81(4), 664-682.
- Laidlaw, L. (2017). *Digital governance: Bridging the gap between policy and technology*. Springer.
- Lembaga Administrasi Negara (2019). *Laporan tentang penerapan e-Government di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lueg, K., & Huitema, D. (2018). *Public-private partnerships in governance and digitalization: Opportunities and challenges*. International Journal of Public Administration, 41(8), 649-660.
- Mansell, R., & Silverstone, R. (2018). *The digitalization of governance and the challenges of accountability*. Information Communication & Society, 21(5), 751-764.
- Medaglia, R. (2020). *Digital governance in the public sector: Transformation and challenges*. Government Information Quarterly, 37(1), 1-14.
- Melville, N., & Gable, M. (2019). *Technological integration in public sector governance: A critical review*. Journal of Technology Transfer, 44(2), 123-139.
- Moerland, M., & Wever, M. (2018). *The role of digital governance in promoting transparency*. Journal of Public Administration, 39(1), 85-99.
- Mulgan, R. (2019). *Accountability and transparency in digital governance*. Public Administration Quarterly, 43(2), 234-249.
- Mustanir, A., Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., Faried, A. I., Kusnadi, I. H., & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Dinamika administrasi publik Indonesia. Padang (Sumatera Barat): PT Global Eksekutif Teknologi*.
- O'Neill, O. (2017). *Good governance in the digital age*. Cambridge University Press.
- Patton, C., & Karkkainen, B. (2018). *Public-private collaborations in governance and e-government: A framework for analysis*. Public Administration Review, 58(2), 143-158.
- Pereira, A. P., & Vasconcelos, F. P. (2018). *Public sector digitalization in Europe: Lessons learned*. European Journal of Public Administration, 25(4), 215-230.
- Pineda, I., & Lima, F. (2019). *Transforming governance through digital tools: A conceptual framework*. Journal of Digital Governance, 9(2), 154-167.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis*. Oxford University Press.
- Public Policy Review, 17(3), 213-227.

-
- Rose-Ackerman, S. (2018). *Corruption and governance in the digital era*. *Public Integrity*, 20(4), 319-334.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2019). *Collaborative governance and the role of digital tools in public administration*. *Policy & Internet*, 11(2), 188-206.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2020). *Innovation in public administration: The impact of digitalization*. *Public Management Review*, 22(3), 413-430.
- Uhlener, L., & Bressers, H. (2018). *Transparency in digital governance and the fight against corruption*. *International Public Management Journal*, 22(1), 1-15